

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arni, Muhammad, 2009, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kriyantono, Rachmat, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Publik Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta : Putra Grafika
- Leedy, Paul.D., Jeanne.E. Ormrod, 2005, *Practical Research: Planning and Design a Research Edisi 8*, Ohio : Pearson Merrill Prentice Hall
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, 2012, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Noeng, Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan ke-19*, Bandung: CV Alfabeta
- Sunudyantoro, Toby Mendel, 2014, *Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak atas Informasi*, Jakarta: AJI Indonesia
- Yudhoyono, S.B., dan Ichlasul Amal, 2002, *Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003)*, D.I Yogyakarta: Prosumen dan Forkoma-MAP, UGM

Regulasi

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015.

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2017

Jurnal

- Adinda Permatasari Rahadian, 2013, Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Industri
- Dwi Wahyuniarti Prabowo, 2014, Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process, Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Eka Robert Chandra, 2016, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat", Samarinda: Universitas Mulawarman
- Elina Aryanti, 2015, Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012), Riau: Universitas Riau
- Hastarini Dwi Atmanti, 2010, Kajian Ketahanan Pangan di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro
- Khairunnisa Kamaliah, 2015, Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, Samarinda: Universitas Mulawarman
- Putu Krishna Yogiswara, Piers Andreas Noak, I Ketut Winaya, 2014, Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung), Bali: Universitas Udayana
- Riyadi, Anggiani Septima dan Eko Retnandi, 2012, Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website Subsistem Guru Di Sekolah Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango, Garut: Sekolah Tinggi Teknologi Garut

Septian Rio B, Vonie Yeni P, Bella Pristi, Winda R, Lina Maria, Savira P Anriza, Bunga Yuli, Andhika P, Bagus Putra N, Charis Edo F, 2017, *Transparansi Tanpa Makna*, Surabaya: Universitas Airlangga, Policy Brief

Ulber, Silalahi, 2004, *Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik*, Bandung: Universitas Parahyangan

Wiratmo, Liliek Budiastuti dan Noor Irfan, 2017, *Website Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Online Public Relations*, Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang

Internet

<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/harga-bawang-putih-dan-daging-masih-mahal/> (diunduh 9 Juli 2017)

<http://sumselpostonline.com/masyarakat-butuh-keterbukaan-informasi/> diunduh tanggal 31 Mei 2017)

<http://www.antaranews.com/berita/632250/harga-sejumlah-bahan-pokok-naik> (diunduh 9 Juli 2017)

<http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php> (diunduh tanggal 15 September 2017)

Universal Declaration Of Human Rights.,

www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf (diunduh tanggal 8 Agustus 2017).

